



WACANA PENERAPAN *FULL DAY SCHOOL* UNTUK SISWA SD DAN SMP

Sulis Winurini*)

Abstrak

Untuk memperkuat penanaman pendidikan karakter di sekolah, Mendikbud mewacanakan perpanjangan jam sekolah atau full day school (FDS) terhadap siswa SD dan SMP. Usulan ini memicu polemik. Tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh FDS terhadap karakter anak dan apakah FDS dapat diterapkan di semua SD dan SMP di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur, FDS bisa menurunkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perkembangan pribadi serta sosial anak, tergantung dari isi program dan juga pendekatan pelatihan yang digunakan. Beberapa permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan kita, yaitu rendahnya kualitas guru, belum meratanya distribusi guru, serta belum amannya lingkungan sekolah mengindikasikan Indonesia belum siap menerapkan FDS di SD dan SMP di semua wilayah untuk saat ini.

Pendahuluan

Wacana *full day school* (FDS) untuk siswa SD dan SMP yang diusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengundang pro dan kontra. Mendikbud meyakini bahwa porsi pendidikan karakter di level pendidikan dasar dan menengah belum memadai, sehingga perlu ada penambahan dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Rencananya, anak pulang sekolah pukul lima sore mengikuti rata-rata jam pulang kerja orang tua. Mereka diharapkan bisa pulang bersama-sama orang tua, atau setidaknya ketika mereka pulang sekolah ada orang tua yang mengawasi kegiatan mereka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa anak-anak membutuhkan interaksi dengan teman sebaya

di sekolah, teman di lingkungan tempat tinggal, dan keluarga di rumah. Adanya FDS akan mengurangi intensitas pertemuan anak dengan orang tua, di samping interaksi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, tidak semua orang tua bekerja di luar rumah sehingga tidak bisa digeneralisasikan bahwa FDS bisa menyelesaikan semua permasalahan anak. Apa yang diungkapkan KPAI mewakili keresahan orang tua. Sejalan dengan itu, salah seorang warga memprakarsai petisi menolak kebijakan FDS pada tanggal 9 Agustus 2016. Petisi tersebut ditandatangani 42.168 orang dalam waktu seminggu.

Di sisi lain, pemerhati kebijakan publik, Muhadjir Darwin, menilai positif wacana FDS ini. Menurutnya, gagasan tersebut tepat diterapkan

*) Peneliti Muda Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: suliswinurini@yahoo.com



untuk pendidikan karakter anak mengingat degradasi moral yang dialami generasi muda saat ini. Sebagian orang tua, terutama mereka yang bekerja dan tinggal di kota, mendukung usulan ini. Menurut mereka, dengan lamanya waktu di sekolah, anak lebih leluasa bersosialisasi, berada dalam pengawasan orang dewasa, dibiasakan untuk beribadah bersama, terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan dapat menjamin anak makan siang yang sehat.

Wacana Mendikbud memperpanjang jam sekolah masih berupa gagasan yang perlu dikaji secara mendalam. Dalam rangka mengkritisi usulan Mendikbud, tulisan ini akan membahas pengaruh FDS terhadap karakter anak dan dapatkah FDS diterapkan di semua SD dan SMP di Indonesia saat ini.

Full Day School di Beberapa Negara

Konsep FDS telah lama diterapkan beberapa negara, seperti Singapura, Korea Selatan, China, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Taiwan, Spanyol, dan Jerman. Istilah yang umum digunakan negara lain adalah *After School Program (ASP)*. Setiap negara memiliki alasan tersendiri memunculkan ASP di dalam program pendidikannya.

Di Korea Selatan, munculnya ASP diawali fenomena meningkatnya kebutuhan para orang tua yang berambisi menyukseskan anaknya melalui pendidikan. Pada saat itu, pamor sekolah umum kalah dengan bimbingan belajar. Hal ini menyebabkan kesempatan pendidikan jadi tidak merata, terjadi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antarkelas. Pemerintah beranggapan ASP bisa menjadi cara untuk menghilangkan kesenjangan ini sekaligus meningkatkan pamor sekolah umum.

Di Amerika Serikat, ASP dilakukan untuk mengatasi tingginya kriminalitas anak yang berdasarkan hasil penelitian terjadi sebagai akibat minimnya pengawasan orang dewasa pada jam-jam pulang sekolah. Pada saat itu, kesenjangan antara jadwal kerja orang tua dan jadwal sekolah anak bisa mencapai 20-25 jam per minggu. Banyak kalangan berkeyakinan, ASP bisa membantu mengatasi permasalahan ini.

Di Singapura, ASP diterapkan karena anak-anak sudah terbiasa menghabiskan waktu untuk les dan menyelesaikan pekerjaan rumah setelah jam sekolah. Hasil survei memperlihatkan bahwa 98 persen anak-anak di Singapura mengikuti pelajaran tambahan

setelah jam sekolah. Menurut Dr. Stuart Martin, Kepala Sekolah Internasional Nexus Singapura, lebih banyak libur tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dampak Penerapan FDS terhadap Karakter Anak

Beberapa penelitian yang dipublikasikan *Harvard Family Research Project* pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa ASP bisa meningkatkan perkembangan sosial dan kepribadian anak, di samping pencapaian akademik. Gottfredson *et al.* yang telah melakukan penelitian terhadap siswa di Maryland pada tahun 1999-2000 mengungkapkan bahwa partisipasi siswa dalam ASP memang dapat menurunkan perilaku bermasalah, tetapi hal ini hanya terjadi pada siswa pendidikan menengah, bukan pada siswa pendidikan dasar.

Ada dua hal yang menjadi catatan dalam hasil penelitiannya. *Pertama*, penurunan perilaku bermasalah tidak diperoleh dengan mempersempit ruang kosong pengawasan orang dewasa atau dengan meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas yang konstruktif. Penurunan perilaku bermasalah diperoleh dengan meningkatkan intensi mereka untuk menghindari obat-obatan terlarang serta bergaul dengan teman-teman yang tidak bermasalah. *Kedua*, kegiatan yang berkontribusi paling besar terhadap penurunan perilaku bermasalah adalah kegiatan pengembangan kompetensi sosial serta kepribadian. Hasil penelitian ini konsisten dengan kesimpulan bahwa salah satu alasan yang mendasari absennya hasil positif pada program sekolah dasar adalah karena program pada sekolah dasar tidak menekankan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi sosial serta kepribadian.

Burdumy, Dynarski, dan Deke, melalui hasil penelitian yang dirilisnya pada tahun 2006, justru menyatakan bahwa ASP dapat meningkatkan perilaku negatif pada siswa laki-laki pendidikan dasar dan siswa yang sebelumnya memang memiliki masalah disiplin. Berbeda dengan Gottfredson *et al.*, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pada siswa pendidikan menengah, terjadi peningkatan perilaku negatif secara signifikan meskipun tidak besar. Menurut mereka, hal ini berkaitan dengan perbedaan kebijakan disiplin yang diterapkan ASP dan sekolah. Sekolah memiliki peraturan yang ketat dengan menghukum siswa apabila melanggar peraturan.

Sementara peraturan di dalam ASP lebih longgar sehingga kesempatan siswa menampilkan perilaku tidak disiplin menjadi lebih besar.

Secara khusus, Durlak dan Weissberg melakukan penelitian terhadap 73 program ASP yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi sosial dan kepribadian. Hasilnya menunjukkan bahwa ASP berhasil meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri siswa, memperkuat perasaan dan sikap positif terhadap sekolah, meningkatkan perilaku sosial yang positif, serta pencapaian akademik. ASP juga bisa menurunkan permasalahan perilaku dan penggunaan obat-obatan terlarang. Namun demikian, mereka menekankan bahwa program yang berhasil hanyalah program-program yang mengikuti kaidah-kaidah *evidence-based training approaches*. Pakem-pakem yang dimaksud adalah dua kriteria yang berhubungan dengan proses, yaitu hadirnya rangkaian aktivitas dan penggunaan bentuk pembelajaran yang aktif, serta dua kriteria lain yang berhubungan dengan isi, yaitu program yang terfokus dan target yang eksplisit.

Sudah Siapkah Indonesia Menyelenggarakan FDS?

Vandell dan Shumow mengungkapkan bahwa pemanfaatan FDS tergantung dari kesempatan anak membuat keputusan dan iklim positif yang tercipta di sekolah yang berhubungan dengan rasio antara staf pengajar dengan anak serta kualifikasi dari staf pengajar tersebut. Sejauh mana FDS memasukkan program pencegahan perilaku bermasalah yang efektif juga menjadi faktor kunci keberhasilan FDS.

Ada beberapa fakta yang perlu diperhatikan pemerintah dalam penerapan FDS. *Pertama*, sistem pendidikan di Indonesia saat ini belum lepas dari permasalahan mendasar. Mendikbud sebelumnya, Anies Baswedan, bahkan pernah menyebut pendidikan di Indonesia dalam situasi gawat darurat. Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan Kemendikbud, dari 40.000 sekolah di tahun 2012, 75% di antaranya tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Hasil uji kompetensi terhadap 460.000 guru di tahun 2012 menunjukkan bahwa nilai rata-rata uji kompetensi guru adalah 44,5, sementara standar yang diharapkan adalah 7. Laporan yang disusun Kemendikbud di tahun 2013 menyebutkan bahwa distribusi guru di antara sekolah sangat tidak merata. Pada umumnya, sekolah-sekolah di pedesaan dan daerah terpencil kekurangan

guru, sementara sekolah-sekolah di perkotaan memiliki jumlah guru yang lebih banyak daripada ketentuan standar kepegawaian nasional. Selain itu, guru yang lebih berkualitas dan lebih berpengalaman pada umumnya terkonsentrasi di perkotaan yang lebih makmur. Misalnya, lebih dari setengah jumlah guru SD dan SMP di daerah perkotaan bergelar sarjana, sedangkan hanya 20% guru di daerah pedesaan terpencil yang bergelar sarjana.

Kedua, kekerasan terhadap anak di sekolah masih sering terjadi. Hasil riset *LSM Plan International* dan *International Center for Research on Women (ICRW)* yang dirilis awal Maret 2015 ini menunjukkan, terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. KPAI menyatakan bahwa dari Januari 2011 hingga 2013, kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan, tetapi menurun pada tahun 2014. Khusus untuk anak korban kekerasan di sekolah yang menerima kekerasan fisik dan psikis pada tahun 2013 terdapat 96 kasus, tahun 2014 terdapat 159 kasus, dan hingga pertengahan tahun 2015 terdapat 15 kasus. Di akhir 2015, Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh, juga menyebutkan kenaikan jumlah anak sebagai pelaku kekerasan atau *bullying* di sekolah sepanjang tahun 2015, yang mencapai 79 kasus anak sebagai pelaku *bullying* dan 103 kasus dengan anak sebagai pelaku tawuran. Hal ini menggambarkan bahwa lingkungan sekolah belum menjamin keamanan dan kesejahteraan anak secara penuh.

Lebih lanjut, kebutuhan FDS bagi anak dan orang tua di Indonesia belum terbaca secara jelas mengingat beragamnya karakteristik wilayah dan situasi kondisi masyarakat di Indonesia. Bupati Bojonegoro, Suyoto, mengungkapkan bahwa interaksi sosial di lingkungan desa masih sangat tinggi. Kebanyakan anak mengisi waktu dengan mengaji selepas jam sekolah. Para orang tua juga selalu mengawasi aktivitas anak sehingga FDS kurang dibutuhkan. Sementara Sekretaris Daerah Karo, Sabarina, melihat dengan sudut pandang berbeda. FDS dianggap perlu karena anak-anak di Karo memiliki banyak waktu kosong selepas pulang sekolah, tanpa kehadiran orang tua yang notabene menghabiskan waktu di ladang seharian. Beberapa kalangan berasumsi bahwa FDS lebih cocok diterapkan di daerah perkotaan karena tingginya angka ibu bekerja di daerah perkotaan. Kendati demikian, belum ditemukan data yang mendukung

terhadap hal tersebut, misalnya data jumlah ibu bekerja di luar rumah dengan anak usia 6-15 tahun di setiap wilayah, data mengenai kasus penyimpangan perilaku anak pada jam-jam pulang sekolah di setiap wilayah.

Berdasarkan beberapa kondisi pendidikan seperti yang telah disebutkan di atas, tampaknya penerapan FDS untuk semua SD dan SMP di seluruh wilayah Indonesia belum sesuai untuk saat ini. FDS memerlukan pematangan lebih lanjut jika ingin diterapkan di kemudian hari.

Penutup

Ulasan di atas memperlihatkan bahwa FDS bisa dimanfaatkan dengan baik apabila mengikuti kaidah-kaidah *evidence-based training approach*. Sayangnya, Indonesia belum siap menerapkan FDS di semua SD dan SMP saat ini. tampaknya, pemerintah perlu mematangkan konsep FDS ini. Dalam rangka persiapan FDS ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu: 1) membenahi permasalahan di dalam sistem pendidikan; 2) membuat perencanaan yang jelas mengenai FDS; 3) memetakan kebutuhan FDS di setiap wilayah untuk menyelaraskan tujuan program dan pelaksanaan kegiatan; 4) mengkaji perkembangan dan kesiapan psikologis anak sebagai acuan penetapan model kegiatan, substansi kegiatan serta penentuan lamanya jam sekolah; 5) mengkaji kesiapan sumber daya sekolah, seperti fasilitas, sarana dan prasarana, guru; dan 6) mengkaji alokasi dana yang tersedia. Hasil pengkajian menjadi dasar bagi pemerintah untuk menilai apakah FDS bisa dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam hal ini, DPR RI, khususnya Komisi X, perlu memantau kajian yang disusun pemerintah untuk memastikan bahwa FDS bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Referensi

- Gottfredson, Denise C., Gerstenblith, Stephanie A., Soul'e, David A., Womer, Shannon C., Lu, Shaoli. (2004). *Do After School Program Reduce Delinquency?* Prevention Science. Vol 5 No 4, 253-265.
- Burdumy, Susan James., Dynarski, Mark., Deke, John. (2006). *After School Program Effects on Behavior: Results from the 21st Community Learning Centers Program National Evaluation*, http://athens.src.uchicago.edu/jenni/EI/Burdumyetal/Burdumy_Dynarski_etal_EI_final.pdf, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016.
- Durlack, Joseph A., Weissberg, Roger P. (2007). *The Impact of After School Programs That Promote Personal and Social Skills*. <http://www.uwex.edu/ces/4h/afterschool/partnerships/documents/ASP-Full.pdf>, diakses 15 Agustus 2016.
- Kemendikbud. (2014). *Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia*. , <http://dikdas.bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2014/12/Paparan%20Menteri%20-%20Kadisdik%20141201%20-%20Low%20v.o.pdf>, diakses 10 Agustus 2016.
- Kemendikbud, The World Bank, BEC-TF, European Union, Kingdom of the Netherlands. (2013). *Mendayagunakan Guru dengan Lebih Baik: memperkuat Manajemen Guru untuk Meningkatkan Efisiensi dan Manfaat Belanja Publik*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/704271468044660179/pdf/741550BRIoINDO00Box377384BooPUBLICo.pdf>, diakses 10 Agustus 2016.
- "After School Programs In The 21st Century". (2008). Harvard Family Research Project. *Issues and Opportunities In Out Of School Time Evaluation No 10*, <http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/after-school-programs-in-the-21st-century-their-potential-and-what-it-takes-to-achieve-it>, diakses 15 Agustus 2016.
- "Asia's teachers say copying their school hours won't help Britain", <http://www.telegraph.co.uk/education/expateducation/10064798/Asias-teachers-say-copying-their-school-hours-wont-help-Britain.html>, diakses 16 Agustus 2016.
- "Di Balik Marak Kekerasan di Sekolah." <http://www.harnas.co/2015/09/22/di-balik-marak-kekerasan-di-sekolah>, diakses 11 Agustus 2016.
- "Full Day School Tak Cocok di Desa." <http://www.harnas.co/2016/08/10/full-day-school-tak-cocok-di-desa>, diakses 11 Agustus 2016.
- "Ini Alasan Mendikbud Usulkan "Full Day School"." <http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/08/12462061/ini.alasan.mendikbud.usulkan.full.day.school>, diakses 10 Agustus 2016.
- "Ribuan Orang Teken Petisi Tolak Rencana Sekolah Sehari Penuh." <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/09/079794524/ribuan-orang-teken-petisi-tolak-rencana-sekolah-sehari-penuh>, diakses 10 Agustus 2016.
- "Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah." <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>, diakses 11 Agustus 2016.